

**KEMAMPUAN GURU
DALAM MENYUSUN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
THE TEACHERS' ABILITY TO ENACT THE SCHOOL-BASED CURRICULUM**

Herry Widyastono
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud
Jl. Gunung Sahari IV - Jakarta Pusat
Email: herrywidyastono@yahoo.com

Diterima tanggal: 22/07/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal: 25/07/2012, Disetujui tanggal: 30/08/2012

Abstrak: *Studi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Studi ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September 2011. Responden berasal dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang sebanyak 150 orang guru yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Terdiri atas 30 orang guru SD, 50 orang guru SMP, dan 70 orang guru SMA, mengajar Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, Kimia, atau Biologi. Teknik pengolahan datanya adalah studi analisis dokumen. Triangulasi dilakukan dengan cara diskusi fokus di dalam kelas (6 kelas), yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap orang-orang tertentu untuk memvalidasi data dan informasi. Hasil studi menyimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (silabus), yang meliputi komponen: 1) standar kompetensi; 2) kompetensi dasar; 3) materi pokok; 4) kegiatan pembelajaran; 5) indikator; 6) penilaian; 7) alokasi waktu; dan 8) sumber belajar, masih sangat rendah, bahkan kebanyakan hanya mengadopsi kurikulum dari satuan pendidikan lain atau dari penerbit buku yang belum tentu sesuai dengan satuan pendidikannya. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah pusat agar melakukan penataan ulang kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.*

Kata kunci: *kemampuan guru, kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus.*

Abstract: *The objective of the study is to obtain the information on the teachers' ability in enacting the school-based curriculum. This is a descriptive research using qualitative approach. The data collection was conducted in September 2011. The respondents of the research are from Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, and Tangerang as much of 150 teachers, and they are chosen based on the purposive technique sampling. They consist of 30 primary teachers, 50 junior high teachers, and 70 senior high teachers. Some of whom are teaching Math, Science, Physics, Chemistry, or Biology. The data of the document is analysed, and the triangulation was conducted through focus discussion in a classroom (6 classroom), which then be continued by interviewing comprehensively to some of them in order to get the valid data. The research concludes that the teachers' ability in writing up school-based curriculum (syllabus) which comprises the components of 1) standard competence; 2) basic competence; 3) core content; 4) learning activities; 5) indicator; 6) evaluation; 7) time allotment; and 8) learning resource are still very low and even most of them merely adopt other school curriculum or using them produced by book-publishers which are not actually suitable to themselves. It is therefore, advisable that the government should do some serious effort to redesign the in effect curriculum to become the national, province, district, and school curriculums.*

Keywords: *the teachers' ability, school-based curriculum, syllabus.*

Pendahuluan

Sejak zaman kemerdekaan, pendidikan dasar di Indonesia setidaknya sudah mengalami delapan kali penyempurnaan kurikulum. Berturut-turut mulai dari tahun 1947 yang istilahnya adalah Rencana Pelajaran 1947, tahun 1964 disempurnakan menjadi Rencana Pendidikan 1964, tahun 1968 disempurnakan menjadi Kurikulum 1968, tahun 1975 disempurnakan menjadi Kurikulum 1975, tahun 1984 disempurnakan menjadi Kurikulum 1984, tahun 1994 disempurnakan menjadi Kurikulum 1994, tahun 2004 disempurnakan menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tahun 2006 disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum yang disempurnakan bukan berarti kurikulum sebelumnya jelek, tetapi karena sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Kurikulum baik di zamannya (Hasan, 2000), zaman berubah maka kurikulum pun diubah, harus selalu disesuaikan dengan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda "Hendaklah kita mengajar peserta didik kita sesuai dengan zamannya" (Savitri, 2007). Selain itu, kurikulum juga harus berwawasan ke depan dan relevan dengan kebutuhan (Arismunandar, 1996).

Kurikulum 1947 sampai Kurikulum 2004 sifatnya sentralistik (Kurikulum Nasional), sesuai dengan era pengelolaan pemerintahan pada saat itu yakni sentralistik. Kurikulum disusun oleh pemerintah pusat, guru tinggal mengimplementasikannya di satuan pendidikan masing-masing.

Seiring dengan perubahan pengelolaan pemerintahan, yang memasuki era desentralisasi, otonomi daerah, diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan, berupa desentralisasi pendidikan, otonomi pendidikan, dan otonomi satuan pendidikan, kurikulum yang sifatnya sentralistik sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dengan kurikulum yang sentralistik, di mana satu kurikulum diberlakukan untuk semua peserta didik dari Sabang sampai Merauke, berarti potensi dan kemampuan peserta didik seolah-olah dianggap sama. Kenyataannya, potensi dan kemampuan setiap peserta didik berbeda satu dengan yang lain, berbeda antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan

yang lain, berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain; dan yang paling memahami potensi dan kemampuan setiap peserta didik adalah guru-guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang paling ideal menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah para guru yang bersangkutan.

Pada tahun 2005 telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP 19/2005 tersebut mengatur tentang kurikulum pendidikan dan mengamanatkan bahwa kurikulum satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan, yang disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Satuan pendidikan bersama komite sekolah/madrasah diharapkan mampu mengembangkan sendiri KTSP. Pengembangan KTSP sesuai dengan: 1) tujuan satuan pendidikan; 2) potensi daerah/karakteristik daerah; 3) sosial budaya masyarakat setempat; dan 4) peserta didik, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri kurikulumnya; hal ini merupakan perwujudan dari kebijakan otonomi pendidikan dalam rangka *school based management*. Namun, kebijakan ini ada yang menganggapnya merupakan langkah yang terlalu berani mengingat menurut sejarah pendidikan di Indonesia, bahkan sejak zaman kolonial, belum sekalipun satuan pendidikan diberikan kewenangan menyusun sendiri kurikulumnya.

Ternyata, setelah KTSP diberlakukan selama sekitar lima tahun, keraguan tersebut sesuai dengan isu-isu di lapangan, banyak guru yang belum siap menerima pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyusun sendiri kurikulum satuan pendidikannya. Pada akhirnya sampai saat ini hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi kurikulum satuan pendidikan lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan studi tentang kemampuan guru dalam menyusun KTSP, yang masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah kemampuan guru dalam menyusun KTSP?" Tujuan studi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam menyusun KTSP, yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan dalam rangka melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penerapan KTSP yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Kajian Literatur

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang bertanggung jawab menyusun guru juga. Studi ini difokuskan pada dokumen 2, yaitu Silabus mata pelajaran Matematika, IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun oleh Guru SD, SMP, dan SMA.

Silabus sekurang-kurangnya meliputi komponen: 1) Standar Kompetensi (SK); 2) Kompetensi Dasar (KD); 3) Materi Pokok; 4) Kegiatan Pembelajaran; 5) Indikator; 6) Penilaian; dan 7) Sumber Belajar (BSNP, 2006), yang dapat disusun secara narasi ke bawah maupun dalam bentuk tabel seperti Tabel 1 dan Tabel 2.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

SK dan KD terdapat dalam Standar Isi yang telah disahkan pemberlakuannya dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski sudah disahkan dalam Permendiknas, namun dalam rangka penyusunan Silabus, SK dan

Tabel 1. Format Silabus Alternatif 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN	SUMBER BELAJAR

Sumber: BSNP, 2006

Tabel 2. Format Silabus Alternatif 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI POKOK	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	SUMBER BELAJAR

Sumber: BSNP, 2006

tertentu. Sedangkan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP 19/2005)

KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu dokumen 1, yang bertanggung jawab menyusun Kepala Satuan Pendidikan; dokumen 2, yang berupa silabus mata pelajaran, yang bertanggung jawab menyusun guru; dan dokumen 3, berupa rencana

KD perlu dikaji dengan memperhatikan: 1) urutannya berdasar hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang terdapat dalam SI; 2) keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran yang sama; dan 3) keterkaitan antara SK dan KD antarmata pelajaran.

Materi Pokok

Menetapkan materi pokok mengacu pada KD dengan mempertimbangkan: 1) potensi peserta didik; 2) relevansinya dengan karakteristik daerah; 3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; 4) kebermanfaatannya bagi peserta didik; 5) struktur keilmuan; 6) aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 8) alokasi waktu yang tersedia.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik, yang meliputi kecakapan akademik, kecakapan pribadi, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional.

Mengembangkan kegiatan pembelajaran mengacu pada KD dengan memperhatikan bahwa: 1) kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional; 2) kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai KD. Yang belajar adalah peserta didik, sehingga yang harus aktif adalah peserta didik, bukan gurunya. Untuk mengaktifkan peserta didik dalam belajar, perlu dilakukan langkah-langkah kegiatan: (a) Pendahuluan (apersepsi) yang tujuannya agar peserta didik siap secara fisik dan mental untuk memperoleh informasi baru, yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap tertentu; (b) Kegiatan inti, berupa: (i) eksplorasi, (ii) elaborasi, dan (iii) konfirmasi; (c) Penutup (evaluasi), untuk mengukur daya serap peserta didik, yang kemudian dipakai sebagai acuan menetapkan tindak lanjut (Depdiknas, 2007c). Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) tertentu dapat

melanjutkan ke kompetensi berikutnya, sedangkan yang belum tuntas diberikan *remedial teaching*. Ukuran tuntas, menurut Bloom (1956) minimal telah menguasai 75% dari kompetensi yang ditetapkan, sedangkan di satuan pendidikan sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan sebelumnya; 3) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran; dan 4) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung tiga unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik, materi, dan nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi.

Indikator

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan mengacu KD, dan mempertimbangkan karakter peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional (KKO) yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan alat penilaian.

Penilaian

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan mengacu indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan: tes dan nontes, dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri (Depdiknas, 2007a).

Penilaian perlu memperhatikan hal-hal berikut: 1) penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi; 2) penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap

kelompoknya; 3) sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik; 4) hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah KKM, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi KKM; 5) sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses), misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah Minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, obyek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan atas SK, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selain itu, juga mengacu pada Standar Sarana-Prasarana (Depdiknas, 2007b).

Metodologi Penelitian

Studi ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September 2011.

Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: 1) latar belakang pendidikannya lulusan Strata 1 dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), dari perguruan tinggi negeri maupun swasta; 2) profesinya sebagai guru, baik guru SD, SMP, maupun SMA, negeri maupun swasta, dan mengajar Matematika, IPA, Fisika, Kimia, atau Biologi; dan 3) sedang mengikuti kuliah Telaah Kurikulum Matematika atau Telaah Kurikulum IPA pada Program Pascasarjana UNINDRA.

Berdasar kriteria tersebut diperoleh responden sebanyak 150 orang guru berasal dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang, terdiri atas 30 orang guru SD, 50 orang guru SMP, dan 70 orang guru SMA. Dari 150 responden tersebut, yang sedang mengikuti kuliah Telaah Kurikulum Matematika sebanyak 70 orang dan Telaah Kurikulum IPA sebanyak 80 orang, yang tersebar di 3 kelas paralel Program Studi Matematika dan 3 kelas paralel Program Studi IPA.

Data dan informasi tentang kemampuan guru dalam menyusun silabus diperoleh berdasarkan dokumen yang telah disusun guru. Masing-masing responden diminta untuk memilih dokumen salah satu silabus dari salah satu SK yang dianggap paling baik dibanding lainnya. Kemudian silabus yang telah dipilih dikumpulkan kepada peneliti.

Teknik pengolahan datanya adalah studi analisis dokumen. Peneliti dibantu ahli bidang studi MIPA melakukan studi analisis dokumen terhadap masing-masing silabus. Triangulasi dilakukan dengan cara diskusi fokus di dalam kelas (6 kelas), yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap orang-orang tertentu untuk memvalidasi data dan informasi.

Hasil Studi dan Pembahasan

Kompetensi Dasar (KD)

KD merupakan penjabaran dari SK, yang keduanya terdapat dalam SI. Meskipun SK dan KD ini sudah dibakukan dengan Permendiknas, namun sebenarnya satuan pendidikan masih diberi kewenangan untuk mengaturnya, bahkan menyempurnakannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (BSNP, 2006).

Responden tidak ada satupun yang menyempurnakan rumusan KD, meskipun rumusan KD tidak sinkron dengan rumusan SK. Misalnya dalam mata pelajaran Fisika SMA tentang Viktor, peserta didik harus memiliki kemampuan prasyarat tentang Trigonometri pada mata pelajaran Matematika. Tetapi ternyata materi Matematika tersebut belum diajarkan, sehingga urutan materi Matematika tersebut seyogyanya diubah, yakni diajarkan mendahului materi Viktor pada mata pelajaran Fisika. Contoh yang lain, pada SK kemampuan peserta didik dituntut sampai pada ranah C-3 (penerapan), sedangkan pada KD hanya ranah C-1 (pengetahuan) dan C-2 (pemahaman). Ketika hal ini ditanyakan lebih lanjut, alasan responden tidak ada yang berani mengubah karena menurut Pengawas dan Kepala Satuan Pendidikan SI tidak boleh diubah karena sudah dibakukan oleh Menteri, sehingga dianggap semuanya sudah benar.

Materi Pokok

Materi pokok merupakan ruang lingkup atau batasan keluasan dan kedalaman materi yang harus dipahami peserta didik, mengacu pada KD.

Materi pokok yang dirumuskan sebagian besar responden (75%) kurang tegas ruang lingkungnya, misalnya dalam Matematika SD ditulis "Penjumlahan" tanpa disebutkan sampai bilangan berapa. Seharusnya rumusannya berbunyi "Penjumlahan sampai bilangan 100, atau 1000, atau sampai n" sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Contoh yang lain, misalnya dalam IPA SD ditulis "Perkembangbiakan adenium" tanpa disebutkan berbagai caranya. Seharusnya rumusannya berbunyi "Perkembangbiakan adenium, melalui: 1) biji; 2) stek; 3) cangkok; dan 4) okulasi; seperti pada Bagan 1.

Ketika ditanya lebih lanjut, alasan guru-guru adalah karena sudah ada dalam buku teks

pelajaran yang merupakan buku wajib untuk siswa, sehingga tidak perlu dirumuskan seperti itu. Seharusnya, meskipun sudah ada dalam buku teks tetap harus ditulis di dalam silabus, karena kalau beranggapan sudah ada dalam buku teks tidak perlu ditulis, maka tidak perlu ada silabus, karena yang ada dalam silabus semuanya sudah tertulis di buku teks.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan rangkaian atau langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai KD. Peserta didik yang belajar, bukan guru yang belajar. Oleh karena itu, peserta didiklah yang harus aktif, guru memfasilitasinya. Untuk mengaktifkan peserta didik dalam belajar, setelah guru melakukan apersepsi, dilanjutkan kegiatan inti dengan menugaskan peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi. Kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi yang difasilitasi guru. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga harus mencerminkan nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi, sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini dapat diilustrasikan seperti Bagan 2.

Kegiatan pembelajaran yang dirumuskan sebagian besar responden (90%) tidak mencerminkan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, melainkan guru yang aktif. Dari 10% responden yang mencerminkan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, tidak satupun yang urutannya lengkap mulai dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selain itu, juga tidak mengkomodasi nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi.

Ketika ditanya lebih lanjut, semua guru beralasan bahwa pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dirumuskan dalam RPP.

Bagan 1. Contoh Merumuskan Materi Pokok

KD	MATERI POKOK
Mengembangbiakkan adenium	Perkembangbiakan adenium melalui: 1) biji; 2) stek; 3) cangkok; dan 4) okulasi.

Sumber: Hasil Pengembangan Peneliti

Bagan 2. Contoh Merumuskan Kegiatan Pembelajaran

KD	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengembangbiakkan adenium	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari berbagai cara mengembangbiakkan adenium melalui berbagai sumber belajar (buku teks, VCD, internet, dsb.) secara mandiri dalam kelompok, untuk mengembangkan rasa ingin tahu. (Eksplorasi) • Memerinci berbagai cara mengembangbiakkan adenium melalui diskusi kelompok untuk mengembangkan rasa ingin tahu. (Elaborasi) • Mempraktekkan berbagai cara mengembangbiakkan adenium secara kelompok untuk mengembangkan rasa ingin tahu. (Elaborasi) • Mempresentasikan berbagai cara mengembangbiakkan adenium di depan kelas (wakil masing-masing kelompok) untuk mengembangkan rasa ingin tahu. (Elaborasi) • Menyimpulkan berbagai cara mengembangbiakkan adenium, secara bersama-sama untuk mengembangkan rasa ingin tahu. (Konfirmasi)

Sumber: Hasil pengembangan peneliti

Adapun nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi diletakkan pada kolom tersendiri. Namun, ketika dicek RPPnya, ternyata rumusan Kegiatan Pembelajarannya juga belum mencerminkan kegiatan belajar yang mengaktifkan peserta didik. Bahkan rumusannya antara lain berbunyi “Guru menjelaskan perkembangbiakan adenium” yang berarti gurunya yang aktif. Nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi karena diletakkan pada kolom tersendiri akibatnya banyak yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran, cenderung sekedar memasukkan nilai-nilai tersebut tanpa memikirkan implementasinya.

Indikator

Indikator merupakan tanda-tanda untuk mencapai KD. Oleh karena itu, indikator dirumuskan dalam rangka mencapai KD, dalam bentuk kata kerja operasional (KKO) yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Hal ini dapat diilustrasikan seperti Bagan 3.

Indikator yang dirumuskan sebagian besar (90%) responden selain rumusannya tidak benar karena tidak terukur (tidak menggunakan KKO) juga kurang lengkap, dan tidak satupun yang mencerminkan nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi. Tentang nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan

Bagan 3. Contoh Merumuskan Indikator

KD	INDIKATOR
Mengembangbiakkan adenium	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan berbagai cara mengembangbiakkan adenium secara mandiri untuk mengembangkan rasa ingin tahu. • Memerinci masing-masing cara mengembangbiakkan adenium secara mandiri untuk mengembangkan rasa ingin tahu. • Mendemonstrasikan (praktikum) berbagai cara mengembangbiakkan adenium secara kelompok untuk mengembangkan rasa ingin tahu.

Sumber: Hasil pengembangan peneliti

antikorupsi setelah ditanya lebih lanjut, responden beranggapan tidak perlu muncul di dalam indikator karena tidak perlu dinilai. Hal ini tidak benar, karena penilaian harus mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi harus tersurat dalam indikator.

Penilaian

Penilaian pencapaian KD berdasarkan indikator, menggunakan tes maupun nontes, dalam bentuk

komprehensif kemudian ditanyakan kepada peserta didik yang kemampuannya diasumsikan medium. Apabila dia dapat menjawab dengan benar, maka diasumsikan separuh dari peserta didik di kelas sudah mencapai KKM. Kemudian dibuat satu soal lagi yang bobotnya sama dengan soal pertama, kemudian ditanyakan kepada peserta didik yang diasumsikan kemampuannya paling rendah. Apabila dia dapat menjawab dengan benar, maka dapat diasumsikan bahwa semua peserta didik di kelas sudah mencapai KKM. Prinsipnya, berdasar tes formatif, peserta didik

Bagan 4. Contoh Merumuskan Penilaian

INDIKATOR	PENILAIAN
<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan berbagai cara mengembangbiakkan adenium secara mandiri untuk mengembangkan rasa ingin tahu. • Memerinci masing-masing cara mengembangbiakkan adenium secara mandiri untuk mengembangkan rasa ingin tahu. • Mendemonstrasikan (praktikum) berbagai cara mengembangbiakkan adenium secara kelompok untuk mengembangkan rasa ingin tahu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tes lisan, untuk mengukur aspek kognitif • Pengamatan kinerja, untuk mengukur aspek keterampilan dalam praktikum • Pengukuran sikap, untuk mengukur aspek sikap peserta didik dalam belajar secara mandiri dan kelompok

Sumber: Hasil pengembangan peneliti

tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, penilaian formatif wajib dilaksanakan, karena untuk mengukur daya serap peserta didik sebelum dilanjutkan membahas kompetensi berikutnya (Bloom, 1956).

Dalam contoh di atas, penilaian tentang mengembangbiakkan adenium, diilustrasikan seperti pada Bagan 4.

Penilaian yang dirumuskan sebagian besar responden (90%) tidak mengukur aspek sikap dan keterampilan, hanya mengukur aspek pengetahuan semata-mata. Itupun hanya berbentuk tes tertulis. Evaluasi formatif jarang dirumuskan dengan alasan kekurangan waktu. Padahal penilaian formatif harus dilakukan, karena untuk mengukur daya serap peserta didik sebelum dilanjutkan membahas kompetensi berikutnya. Penilaian formatif dapat dilakukan secara lisan, misalnya dengan membuat satu soal yang

yang sudah mencapai KKM dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya, yang belum mencapai KKM harus diberikan *remedial teaching*.

Alokasi Waktu

Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan peserta didik. Alokasi waktu tatap muka yang direncanakan oleh kurang dari separuh (50%) responden didasarkan atas jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kepentingan KD. Separuh lainnya hanya didasarkan atas perkiraan semata-mata.

Sumber Belajar

Sumber belajar didasarkan pada SK, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, dan alokasi waktu, yang dapat berupa media cetak (buku teks, buku pengayaan, modul, dsb), media elektronik {internet, *audio visual aid (AVA)*, dsb},

lingkungan (fisik, alam, sosial, budaya), dan nara sumber. Sebagian besar responden (90%) hanya mengandalkan buku teks pelajaran semata-mata, dengan alasan sudah cukup memadai. Padahal, untuk menarik minat peserta didik dalam belajar harusnya menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Misalnya, dalam mengembangbiakkan adenium, dapat menggunakan sumber belajar berupa buku teks, buku pengayaan, internet, AVA, dan lingkungan alam (pohon adenium di kebun satuan pendidikan).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasar hasil studi dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun kurikulum (silabus) masih sangat rendah, sebagian besar hanya mengadaptasi bahkan mengadopsi kurikulum dari satuan pendidikan lain atau dari penerbit buku yang belum tentu sesuai dengan satuan pendidikan (visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan), potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik (kemampuan dan karakteristiknya). Secara rinci seperti dijelaskan sebagai berikut: 1) Tidak ada satupun responden yang menyempurnakan rumusan SK dan/atau KD, meskipun rumusan KD tidak sinkron dengan rumusan SK; 2) Materi pokok yang dirumuskan sebagian besar responden (75%) kurang tegas ruang lingkungannya; 3) Kegiatan pembelajaran yang dirumuskan sebagian besar responden (90%) tidak mencerminkan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, melainkan guru yang aktif. Selain itu, juga tidak mengakomodasi nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi; 4) Indikator yang dirumuskan sebagian besar responden (90%) selain rumusannya tidak benar, karena tidak terukur (tidak menggunakan KKO) juga kurang lengkap, serta tidak satupun yang mencerminkan nilai-nilai karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, dan/atau pendidikan antikorupsi; 5) Penilaian yang dirumuskan sebagian besar responden (90%) tidak mengukur aspek sikap dan keterampilan, hanya mengukur aspek pengetahuan semata-mata. Itupun hanya berbentuk tes tertulis. Selain itu, evaluasi formatif jarang

diimplementasikan dengan alasan kekurangan waktu; 6) Hanya sekitar 50% responden yang merencanakan alokasi waktu tatap muka didasarkan atas jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kepentingan KD. Yang lain hanya perkiraan semata-mata; dan 7) Sebagian besar responden (90%) hanya mengandalkan buku teks pelajaran semata-mata, dengan alasan sudah cukup memadai, tidak memanfaatkan sumber belajar yang lebih menarik.

Hal-hal di atas dapat dimaklumi karena guru-guru ketika masih menempuh kuliah di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) belum diajari tentang bagaimana mengembangkan kurikulum sendiri, yang diajarkan adalah bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat (kurikulum nasional/sentralistik).

Sebagian besar guru menyatakan bahwa silabus yang disusun hanya sekedar untuk formalitas memenuhi administrasi satuan pendidikan, tidak diimplementasikan dalam pembelajaran. Pembelajaran mengacu buku teks pelajaran yang sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, lembar kerja siswa (LKS) yang seharusnya disusun oleh guru, ternyata sebagian besar guru justru membeli dari penerbit, dengan alasan kalau disusun oleh guru tidak ada uang untuk penggandaan atau tidak boleh dijual di satuan pendidikan. Hal ini antara lain sebagai akibat dari adanya kebijakan satuan pendidikan gratis, tidak boleh memungut uang apapun dari peserta didik. Kalau menggunakan LKS dari penerbit, guru tinggal memerintahkan peserta didik membelinya.

Saran

Berdasar simpulan di atas, direkomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar: 1) melakukan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu dan berkelanjutan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas tentang cara-cara penyusunan, implementasi, dan evaluasi KTSP; 2) melakukan evaluasi mendalam tentang kebijakan penerapan KTSP, karena guru belum disiapkan secara matang, sehingga belum siap menerima pelimpahan

kewenangan yang sangat drastis dari Pemerintah Pusat langsung kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan sendiri KTSP (kurikulum desentralistik).

Sebaiknya pelimpahan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum secara berjenjang, mulai dari kewenangan pemerintah pusat (nasional), provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sektor pendidikan (Bappenas, 2010) yang salah satunya, yaitu program aksi tentang kurikulum, yakni penataan ulang kurikulum sekolah menjadi kurikulum tingkat

nasional, daerah, dan sekolah. Dalam hal ini, seyogyanya terdapat pembagian kewenangan berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk mengembangkan silabus dan buku teks mata-mata pelajaran tertentu (pokok), pemerintah provinsi mengembangkan silabus dan buku teks mata-mata pelajaran tertentu lainnya, pemerintah kabupaten/kota mengembangkan silabus dan buku teks mata pelajaran muatan lokal, dan satuan pendidikan tidak lagi mengembangkan silabus melainkan mengembangkan KTSP dan RPP saja.

Pustaka Acuan

- Arismunandar, Wiranto. 1996. *Sistem Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dalam Era Globalisasi: Pengalaman dan Pemikiran di Institut Teknologi Bandung*. Jakarta: Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Balitbang Depdikbud.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta.
- Bloom, Benjamin S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain*. New York: Longman Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007b tentang *Standar Sarana dan Prasarana*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007c tentang *Standar Proses*. Jakarta.
- Hasan, Hamid. 2000. *Kurikulum Masa Depan*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Savitri. 2007. *Kurikulum Highscope: Paper Seminar Kajian Mata Pelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.